

ABSTRAK

Perencanaan Pembangunan tidak hadir dengan sendirinya tetapi di hadirkan oleh aktor-aktor dalam rangka pemenuhan tujuan yang identik dengan intervensi politik. Terdapat hubungan aktor politik yang saling mempengaruhi dalam Proses Perencanaan Pembangunan. Proses tersebut terdiri dari berbagai Tahapan, dimulai dari: Tahap Penyusunan Agenda, Tahap Formulasi Kebijakan, dan Tahap Legitimasi Kebijakan. Masing-masing tahapan tersebut terdapat Aktor yang memiliki kewenangan dalam Perencanaan Pembangunan. Aktor-Aktor ini berasal dari Pemerintah itu sendiri, yang melibatkan Swasta, serta Masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik memiliki kekuasaan dalam melakukan Pembangunan Infrastruktur wilayahnya. Sehingga dalam pembangunan Alon-Alon Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk dilakukannya *Revitalisasi* lahan terbuka masyarakat yang sudah tidak sesuai fungsinya. Lembaga Eksekutif Kabupaten Gresik melibatkan lembaga Legislatif sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk pengawasan, anggaran, dan legislasi. Dilibatkan pula pihak Swasta/Dunia Usaha, serta Organisasi Masyarakat turut di sertakan dalam Perencanaan Pembangunan terkait *Revitalisasi* Alon-Alon Kabupaten Gresik. Maka dari itu semua kepentingan Aktor dapat di diskusikan dengan saling melakukan intervensi, agar nantinya memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik.

Kata Kunci : *Politik Perencanaan Pembangunan, Tahap Formulasi Kebijakan, Aktor Kebijakan, Kepentingan, Intervensi Antar Aktor.*

ABSTRACT

Development Planning does not present itself but is presented by actors in order to fulfill the objectives that are identical with political intervention. There is a relationship between political actors that influence each other in the Development Planning Process. The process consists of various Stages, starting from: Agenda Staging Phase, Policy Formulation Stage, and Policy Legitimacy Stage. Each of these stages is an Actor with authority in the Development Planning. These actors come from the Government itself, which involves the Private, as well as the Society. The Regional Government of Gresik has the power to carry out the Infrastructure Development of its territory. So that in the construction of Alon-Alon of Gresik as an effort to do Revitalization of open land of society that has not functioning properly. The Executive Board of Gresik involves the Legislature as an institution having duties for supervision, budgeting and legislation. Involved also the Private or Business, and Community Organizations are included in the Development Planning related to Alon-Alon Revitalization Gresik. Therefore, all the interests of the Actors can be discussed by mutual intervention, so that later obtained the best agreement in preparing the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) of Gresik.

Keywords : Politics of Development Planning, Policy Formulation Stage, Policy Actors, Interests, Intervention Between Actors.